

RUNTUHNYA KARAKTER BANGSA DAN URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA

Arie Supriyatno

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Muh. Magelang

Abstract

Depravity of a nation can take place because it was reduced to a sense of nationalist consciousness of citizens themselves. There are several factors that affect the nation's moral decay such as the presence of foreign cultures into the Indonesian state is easily accepted by the citizens themselves; Economic factors: The lack of a sense of harmony within the individual.

Nation's moral decline in Indonesia can return to purify the return values of Pancasila which has been tarnished by the dictatorships of the New Order era. As a result of such uncertainty is to discourage the meaning of Pancasila as the ideological glue of unity of the nation, and as a means to foster confidence in the nation's other states that will be associated with Indonesia.

Keywords: *International Standard School*

A. LATAR BELAKANG

Belakangan ini banyak pembicaraan tentang watak bangsa. Berbagai kalangan merasa bahwa watak bangsa kita telah merosot sangat dalam, tidak lagi memiliki karakter yang jelas, menuju menjadi manusia pengecut tanpa pendirian, anarkis, keras kepala tanpa harga diri, dan lain-lain, sehingga mengancam keberlangsungan kita sebagai bangsa dan Negara kesatuan. Betulkah demikian?, Penulis tidak dapat menyimpulkan secara pasti.

Sedemikian mengkhawatirkan kemerosotan watak ini sampai berbagai kalangan pengamat dan ahli meneriakan perlunya pendidikan watak. Pemerintah melalui Kementerian Diknas juga meneriakan hal yang sama. Menurut orang Jawa, orang yang berwatak baik itu akan tampil sebagai manusia yang konsisten dalam perkataan dan perilaku, tidak mencla-mencle, katanya. Ini setara dengan ungkapan Batak :*"risi-risi bata ni jolma, lambok-lambok bata ni begu "*, maksudnya adalah: sebagai manusia harus berani mengatakan kebenaran betapapun itu menyakitkan, orang yang bersilat lidah itu, orang yang hanya mengungkapkan yang manis-manis saja, adalah begu (hantu/setan). Pada orang Batak, manusia berwatak itu adalah manusia yang kenal akan dirinya, *"tanda diri"*.

Itulah sebagian kecil pengertian watak di masyarakat. setiap suku di Indonesia ini pasti mempunyai pengertian tentang apa itu watak yang baik. Tetapi yang mau dipermasalahkan dalam

tulisan ini adalah tentang usulan dari para ahli, sesepuh, pemerintah, pengamat, dan lain-lain, tentang perlunya memasukkan pendidikan karakter ke kurikulum sekolah.

Mereka sepertinya sudah *lupa bahwa sudah lama kita memasukkan agama ke kurikulum sekolah, toh kita tidak semakin bertuhan. Sudah lama juga pendidikan moral masuk ke kurikulum sekolah, toh kita tidak semakin bermoral.* Bisa juga dilihat begini, tidak pernah ada kurikulum korupsi di sekolah tetapi kita sangat koruptif. Di sekolah tidak ada kurikulum atau pelatihan untuk tawuran, toh anak-anak kita melakukannya, sampai beberapa orang mati percuma saat tawuran. Apakah ada sekolah yang mengajarkan anarkisme, tidak ada, toh anarkisme berkembang sangat subur seperti cendawan di musim hujan.

B. KEMEROSOTAN KARAKTERISTIK BANGSA INDONESIA

Seperti yang kita ketahui sekarang ini moral bangsa indonesia semakin merosot hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti karena sudah berkurangnya rasa nasionalis dari setiap warga negaranya, misal akhir-akhir ini banyak warga negara indonesia yang lebih menyukai budaya luar, seperti cara berpakaian yang kebarat-baratan, padahal warga negara indonesia sudah terkenal dengan ada

ketimurannya, namun sekarang itu semua sudah semakin terkikis karena dari warga negara Indonesia sendiri sudah tidak ada perhatiannya lagi. Selain itu masyarakat Indonesia juga sudah terkenal dengan kerukunan dan keramahannya, tapi sekarang ini sudah cukup sulit untuk menemukan kerukunan warganya, sebut saja masyarakat yang tinggal di kota mereka menjalin kerukunan hanya karena adanya kebutuhan, jika tidak adanya kebutuhan maka mereka akan bersikap individual.

Kemerosotan moral juga dapat terjadi karena faktor ekonomi, banyak sekarang warga bangsa Indonesia berlomba-lomba dalam memperbanyak hartanya tanpa memikirkan bagaimana cara untuk memperolehnya, misal banyak orang-orang sukses yang ingin menambang kekayaan dengan mendirikan hotel dan merugikan warga miskin karena tempat tinggalnya banyak yang di gusur, hal tersebut sangat tidak berprikemanusiaan dan sangat bertolak belakang dengan karakteristik bangsa.

Runtuhnya karakter bangsa Indonesia yang mengemuka belakangan ini seperti terlihat pada mudahnya sikap toleran dan menghormati nilai-nilai pluralisme sehingga kekerasan begitu mudah terjadi serta sikap tidak setia pada negara dalam bentuk munculnya gerakan untuk mendirikan negara berlandaskan agama seperti NII ditengarai ada sesuatu yang tidak beres (*there is something wrong*) dalam praktik penyelenggaraan pendidikan kita, mulai jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Berbagai bentuk anomali sosial dan anarkhisme seperti tawuran, perusakan sarana publik, penipuan, pelecehan seksual hingga pembunuhan dan berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya menjadi bukti konkret mudahnya nilai-nilai luhur yang selama ini melekat pada bangsa ini.

Anehnya, terhadap berbagai bentuk penyimpangan seperti itu sebagian masyarakat menyikapinya biasa-biasa saja (Kompas, 17/6/2011). Sanki sosial tak berlaku lagi dan sebagian masyarakat membiarkan, bahkan apatis ketika penyimpangan yang sistematis di berbagai lini kehidupan hukum, pemerintahan, maupun pendidikan itu sendiri. Lebih tragis lagi, beberapa waktu terakhir ini ada gejala sangat aneh bahwa petugas keamanan seperti polisi justru menjadi sasaran kekerasan, bahkan pembunuhan, para petugas hukum malah yang paling banyak melanggar hukum, hakim yang tugasnya menjadi benteng penegak keadilan justru mempertontonkan praktik ketidakadilan, kampus sebagai tempat para intelektual yang seharusnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi

dan menjauhi anarkhisme juga tak luput dari aksi anarkhis seperti perusakan laboratorium, ruang kuliah, perkantoran, intelektual yang mestinya mengedepankan argumentasi dengan nalar logis dalam menyelesaikan persoalan seolah melupakan etika akademik yang menjadi bagian kehidupannya. Semua menjadi tontonan gratis yang memilukan.

Bahwa pendidikan dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap gejala tersebut memang tidak salah dan wajar. Sebab, dibanding dengan institusi-institusi sosial yang lain, pendidikan merupakan yang paling sarat makna.

Pendidikan merupakan pintu masuk untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia berbudi pekerti luhur, berbudaya, berilmu pengetahuan, berketrampilan, berperadaban, dan berkarakter. Karena itu, secara logis mudah dipahami jika di antara tujuan tersebut ada yang tidak tercapai tentu ada yang sesuatu yang tidak beres dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan, bisa landasan filosofis, praktik, pendidik, lingkungan, dan orientasi masa depan peserta didiknya serta perubahan kondisi eksternal yang gagal ditangkap oleh penyelenggara dan pemilik otoritas formal kebijakan pendidikan.

Persoalan pendidikan hakikatnya adalah persoalan masa depan, generasi penerus, dan peradaban sebuah bangsa. Tidak ada satu pun bangsa yang tidak ingin punah karena memiliki generasi penerus yang tidak baik. Karena itu, untuk kelangsungan eksistensi sebuah bangsa tumpuannya pada pendidikan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang berperadaban maju hanyalah mereka yang serius mengelola pendidikan. Bagi mereka, pendidikan di atas segalanya dan dihayati sebagai hajat semua anggota masyarakat. Karena merupakan hajat bersama, maka semua bersinergi membangun pendidikan yang baik sehingga melahirkan lulusan yang berkualitas.

Begitu penting misi yang diembannya, pendidikan tidak bisa dijalankan seenaknya, apalagi hanya untuk mengejar kepentingan sesaat, seperti sekadar lulus Ujian Nasional dengan nilai tinggi, masuk perguruan tinggi, menang olimpiade ini dan itu, meraih gelar, bertaraf internasional dan sebagainya.

Di atas semua itu, pendidikan adalah proses pemanusiaan secara utuh, meliputi aspek jiwa, intelektual, emosi, hingga spiritualnya. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan praktik untuk menjadikan peserta didik bagian dari masyarakat, bangsa dan negara, sehingga lahir sikap cinta tanah air. Ringkasnya, pendidikan adalah proyek kemanusiaan terus menerus dan tidak pernah berakhir sepanjang bangsa itu ada.

Sebagai seorang pendidik, saya sendiri merasakan betul betapa peserta didik kita saat ini terjebak dalam nilai-nilai pragmatisme. Sekadar ilustrasi betapa penulis terkejut ketika seorang teman dosen menyodorkan dokumen kepada saya tentang hasil survei yang dilakukannya di akhir semester sambil melakukan evaluasi perjalanan perkuliahan menanyakan tentang sosok dosen yang diidolakan di mata mahasiswa. Hasil survei sangat mengejutkan karena di luar dugaannya. Ternyata di mata mahasiswa sosok dosen ideal adalah yang tidak begitu ketat alias santai-santai saja, tidak perlu tepat waktu mengawali dan mengakhiri perkuliahan, rileks, tidak banyak tugas, dan nilai murah. Hasil survei itu sungguh mengagetkan penulis, walau bisa diduga sebelumnya. Penulis merenung mengapa peserta didik kita menjadi semacam itu. Jauh berbeda dengan masa-masa ketika penulis masih kuliah dulu. Pertanyaan berikutnya jika demikian kondisinya bagaimana kita menyiapkan generasi penerus yang cerdas dan kompetitif karena menghadapi persaingan global yang begitu ketat yang tidak saja memerlukan kecakapan dan ilmu yang memadai, tetapi juga karakter yang kokoh.

Mencermati kondisi di atas, beberapa kebijakan pendidikan yang selama ini dilakukan memang patut dicermati kembali. Pertama, menyangkut merosotnya karakter bangsa sehingga menimbulkan anomali dan anarkhisme dikaitkan dengan dihapuskannya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi hanya Pendidikan Kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai luhur yang selama ini, seperti toleransi beragama, gotong royong, dan musyawarah. Padahal, nilai-nilai itu sangat dibutuhkan sebagai fondasi bangsa.

Akibat kebijakan tersebut, kini para pendidik mengeluh karena sulitnya menanamkan nilai-nilai tersebut dan dianggap sesuatu yang basi. Seorang kolega yang kebetulan mengajar Pancasila mengeluh karena menasehati siswa dianggap kuno dan tidak populer. Guru yang suka memberi nasihat tentang nilai-nilai luhur dianggap guru 'tempo doeloe' dan dianggap bukan lagi jamannya.

Perubahan kebijakan pengajaran Pancasila menjadi Pendidikan Kewarganegaraan berdampak. Buktinya, penanaman nilai-nilai ternyata tidak bisa diperoleh dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Sebab, ternyata pelajaran tersebut hanya hafalan dan sekadar menambah pengetahuan. Perubahan pendidikan Pancasila menjadi pendidikan Kewarganegaraan sangat mereduksi muatan-muatan utama Pancasila yang sarat nilai. Sementara

itu, pendidikan Kewarganegaraan lebih mengenai hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan, sistem hukum dan peradilan nasional, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kedudukan warga negara. Mengenai Pancasila hanya disinggung sedikit, itu pun sudah di semester akhir. Karena itu menjadi wajar jika nilai-nilai moral di kalangan peserta didik kita luntur. Dengan demikian, sangat tidak fair jika pihak sekolah atau guru disalahkan dalam hal ini. Diakui oleh para guru, sebagaimana dilaporkan Kompas (6/5/2011) bahwa sedikit sekali peluang penanaman nilai dan pembentukan moral anak didik saat ini.

Kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup masyarakat dan sistem politik pemerintahannya. Perubahan pendidikan Pancasila menjadi pendidikan Kewarganegaraan juga tidak lepas dari perubahan pandangan hidup dan pergeseran sistem politik di Indonesia. Karena itu, seiring dengan perubahan pandangan hidup dan perubahan pemerintahan, pendidikan Pancasila juga tidak luput dari perubahan tersebut.

Berdasarkan cermatan Kompas (6/5/2011) kebijakan mengenai pendidikan Pancasila mengalami dinamika pasang surut. Diawali tahun 1965, Presiden Soekarno menetapkan kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dimana pelajaran Pancasila wajib diajarkan sejak tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi. Kebijakan tersebut ditegaskan lagi oleh Presiden Soeharto pada tahun 1967 dengan mengatakan bahwa dasar sistem pendidikan nasional adalah Pancasila. Tahun 1976 Mata Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mulai diajarkan untuk pertama kali di sekolah, menggantikan pelajaran civics (Kewarganegaraan) yang sudah diajarkan sebelumnya. Tahun 1979 Presiden Soeharto membentuk sebuah lembaga yang secara khusus mengkaji nilai-nilai Pancasila dan merumuskan program nasional P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Kendati P4 dinilai sebagai proyek hegemoni pemerintah terhadap masyarakat, harus diakui program tersebut berhasil dengan baik. Nilai-nilai Pancasila berhasil merasuk dalam jiwa seluruh warga masyarakat. Tahun 1983, berangkat dari filsafat bahwa bangsa yang besar adalah mereka yang mau mengetahui dan mempelajari sejarah bangsanya, maka pemerintah memandang penting pelajaran sejarah. Karena itu, sejak tahun itu mata Pendidikan Sejarah mulai diajarkan di semua jenjang pendidikan. Tahun 1994, Mata Pelajaran Pancasila dan Sejarah digabung menjadi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penggabungan tersebut

terasa janggal. Sebab, dengan digabung muatan masing-masing menjadi sangat berkurang. Karena itu, langkah penggabungan tersebut menurut hemat penulis merupakan titik awal memudarnya nilai-nilai moral di kalangan anak didik kita yang dampaknya kita rasakan saat ini.

Para pengambil kebijakan pendidikan mungkin tidak pernah membayangkan dampak penggabungan tersebut. Karena pendidikan adalah sebuah proses, maka dampaknya, positif maupun negatif, baru akan tampak beberapa tahun kemudian.

Seiring dengan tumbuhnya iklim demokratis yang berkembang pasca-berakhirnya kekuasaan Orde Baru di mana hak politik setiap warga negara dihargai, aspirasi dapat disampaikan dengan bebas di tengah hiruk pikuk euforia politik dan reformasi disemua bidang, maka tuntutan untuk mereformasi Pendidikan Pancasila yang dianggap buah dari Orde Baru tak terelakkan. Hasilnya, pada tahun 2001 Mata Pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diganti menjadi Mata Pelajaran Kewarganegaraan, tanpa Pancasila. Sejak tahun itu, Pancasila seolah hanya menjadi hiasan dinding di kantor-kantor pemerintah.

C. KRISIS MULTIDIMENSIONAL BANGSA INDONESIA

Pada saat terjadinya krisis multidimensional yang melanda pada sekitar tahun 1997-an, bangsa ini dilanda oleh berkembangnya sikap anarkhis dan ketidakpercayaan pada pemerintahan pada masa itu, yaitu pemerintahan Orde Baru, yang akhirnya terjadi reformasi pada negeri ini.

Salah satu efek buruk yang terjadi pada era reformasi itu adalah berkembangnya sikap skeptis pada ideologi negara, yaitu Pancasila yang diakibatkan oleh trauma masyarakat atas pendekatan doktriner P4, yang mana dengan pendekatan P4 ini menjadikan Pancasila tidak mencerminkan keseimbangan perlindungan antara moralitas institusional, moralitas sipil, dan moralitas sosial. Bahkan P4 menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup di luar penafsiran nilai-nilai yang formal.

Tujuan utama dari reformasi seharusnya adalah mengembalikan jati diri bangsa dengan mensucikan kembali nilai-nilai Pancasila yang telah ternoda oleh keditakoran era Orde Baru. Akibat dari kegamangan tersebut adalah menyurutkan makna ideologis Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa, maupun sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan bangsa negara lainnya yang akan berhubungan dengan Indonesia.

Terkait dengan sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia maka terdapat kondisi negatif terjadi pada bangsa ini. Sebagai indikatornya adalah: munculnya terorisme, munculnya gerakan radikalisme yang tidak jarang disertai dengan langkah anarkhis yang berakibat pada amuk massa, toleransi yang lemah pada perbedaan pendapat, munculnya gerakan separatisme di elemen kedaerahan, ketiadaan tokoh panutan, memburuknya iklim investasi, dan sebab-sebab lainnya.

Maka saat ini memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah langkah utama yang harus dilakukan demi mengembalikan jati diri bangsa ini. Dalam kondisi semacam itu, bangsa Indonesia harus diyakinkan bahwa persatuan dan kesatuan nasional baik yang bernuansa struktural maupun cultural/solidaritas sosial tetap bisa dipertahankan di negeri ini. Karena sesungguhnya bangsa ini terbentuk dari rasa penderitaan yang sama, yaitu pengalaman dijajah selama ratusan tahun, bukan terbentuk dari falsafah kedaerahan atau primordialisme. Dengan kesadaran itulah bangsa ini seharusnya dapat bersatu kembali dalam toleransi tinggi dan karakter bangsa yang majemuk dan dapat mengembalikan jati diri bangsa dalam satu fondasi kokoh yang termaktub dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Mengembalikan jati diri bangsa tersebut pertama kali harus dibentuk melalui contoh perilaku pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh dan bervisi kebangsaan, yang mempunyai semangat perubahan terhadap hal yang positif demi kepentingan bangsa, global dalam perencanaan pembangunan negara dan transformasional serta tetap memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Maka generasi bangsa ini diharapkan dapat menemukan tokoh yang memiliki karakter-karakter tersebut agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang makmur, penuh toleransi, dan disegani di dunia internasional dengan karakter kebudayaan bangsanya yang beragam.

Belakangan ini banyak pembicaraan tentang watak bangsa. Berbagai kalangan merasa bahwa watak bangsa kita telah merosot sangat dalam, tidak lagi memiliki karakter yang jelas, menuju menjadi manusia pengecut tanpa pendirian, anarkhis, keras kepala tanpa harga diri, dan lain-lain, sehingga mengancam keberlangsungan kita sebagai bangsa dan Negara kesatuan.

Betulkah demikian?,

Penulis tidak dapat menyimpulkan secara pasti. Sedemikian mengkhawatirkan kemerosotan watak ini sampai berbagai kalangan pengamat dan ahli meneriakan perlunya pendidikan watak. Pemerintah

melalui Kementerian Diknas juga meneriakan hal yang sama. Menurut orang Jawa, orang yang berwatak baik itu akan tampil sebagai manusia yang konsisten dalam perkataan dan perilaku, tidak mencla-mencele, katanya.

Ini setara dengan ungkapan Batak :”*risi-risi batak ni jolma, lambok-lambok batak ni begu*“, maksudnya begini: sebagai manusia harus berani mengatakan kebenaran betapapun itu menyakitkan, orang yang bersilat lidah itu, orang yang hanya mengungkapkan yang manis-manis saja, adalah begu (hantu/setan). Pada orang Batak, manusia berwatak itu adalah manusia yang kenal akan dirinya, “**tanda dirim**“:itulah sebagian kecil pengertian watak di masyarakat.

Setiap suku di Indonesia ini pasti mempunyai pengertian tentang apa itu watak yang baik. Tetapi yang mau dipermasalahkan dalam tulisan ini adalah tentang usulan dari para ahli, sesepuh, pemerintah, pengamat, dan lain-lain, tentang perlunya memasukkan pendidikan karakter ke kurikulum sekolah. Mereka sepertinya sudah *lupa bahwa sudah lama kita memasukkan agama ke kurikulum sekolah, toh kita tidak semakin bertuhan. Sudah lama juga pendidikan moral masuk ke kurikulum sekolah, toh kita tidak semakin bermoral*. Bisa juga dilihat begini, tidak pernah ada kurikulum korupsi di sekolah tetapi kita sangat koruptif.

Di sekolah tidak ada kurikulum atau pelatihan untuk tawuran, toh anak-anak kita melakukannya, sampai beberapa orang mati percuma saat tawuran. Apakah ada sekolah yang mengajarkan anarkhisme?, tidak ada, toh anarkhisme berkembang sangat subur seperti cendawan dimusim hujan.

Mengapa demikian? Itu karena hakekat dari pendidikan sudah kita reduksi menjadi sekedar sekolah, seolah-olah hanya di sekolahlah anak mendapatkan pendidikan. Jika kita bicara pendidikan, maka yang kita bicarakan adalah sekolah. Korupsi seolah-olah dapat dicegah dengan memasukkan pendidikan anti korupsi ke kurikulum sekolah. Sepertinya kita semua sepakat untuk melupakan cara mendidik paling esensial dan paling berhasil, yaitu melalui “**teladan dan perbuatan**“. Cara terbaik mendidik anak-anak gemar membaca adalah jika mereka lihat kita gemar membaca.

Tak ada gunanya diajarkan tentang anti korupsi di sekolah, jika sepuluh sekolah yang mereka baca di Koran-koran adalah korupsi Dirjen anu, korupsi DPR, korupsinya Dirut itu, korupsinya Gayus, Nazaruddin, cek perjalanan, hakim yang menjual putusan, pengacara yang membayar untuk mengubah perubahan pasal tuduhan, dll. S e m u a Nabi-Nabi berhasil dalam dakwahnya terutama

bukan karena apa yang diucapkannya, tetapi karena apa yang dilakukannya, konsisten antara ucapan dan perbuatan.

Apakah berarti tidak perlu memasukkan pendidikan karakter ke kurikulum sekolah?, perlu dan sangat perlu, tetapi itu hanya sebagian kecil dari langkah yang diperlukan. Paling penting adalah kita para orang tua, para pejabat Negara, guru-guru sekolah, para ahli-ahli entah ahli apapun, marilah memberi contoh sehari-hari ke anak-anak kita ini, tentang seperti apakah karakter yang baik itu.

Pertanyaan yang ini juga perlu dipikirkan: siapa sesungguhnya yang tidak memiliki karakter? apakah anak sekolah sekarang, atau justru orang-orang yang sudah tidak bersekolah lagi, seperti DPR, Menteri, Dirut, Dirjen, pegawai pajak, pengacara, polisi, tentara, hakim, jaksa, dan lainnya? Menurut penulis, pendidikan karakter lebih diperlukan ke mereka-mereka ini semua, bukan ke anak-anak yang sedang bersekolah sekarang. Jika semua elemen ini mempunyai karakter dan sifat anti korupsi, maka hal itu akan menyebar jauh lebih cepat dan lebih luas dibandingkan melalui kurikulum sekolah. Masalahnya apakah mereka mau? Langkah pertama dan terutama untuk mendidik anak tentang karakter yang baik dan menanamkan sifat anti korupsi ke mereka, adalah dengan kita memiliki karakter dan anti korupsi.

D. KARAKTERISTIK BANGSA INDONESIA

Menurut Amin Sar Manihuruk menyatakan bahwa karakter bangsa Indonesia atau bangsa kita ini sekarang sedang berada di titik nadir.yang bisa disebut sedang dalam keadaan kemerosotan karakter, sebut saja, sekarang ini tindakan anarkhis yang dilakukan masyarakat khususnya para pendemo. Bahkan posisi persatuan dan kesatuan bangsa sering dijadikan alat untuk tawar menawar. Ini sangat menyedihkan,

Amin mengatakan, melemahnya karakter bangsa ini disebabkan karena munculnya demokrasi yang kebablasan di masyarakat. Dengan alasan demokrasi, apapun bisa dilakukan. Padahal, kata Amin, demokrasi dan kebebasan yang dimaksud di Indonesia adalah yang dibatasi dengan norma-norma agama. “Norma agama dijadikan sebagai pagar agar demokrasi itu tidak menembus batas kewajaran. Secara tidak langsung, kebebasan yang tanpa batas ini menghancurkan karakter yang dimiliki bangsa Indonesia yang selama ini sangat kuat di mata negara sahabat.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Tarman Azzam menyatakan, melemahnya karakter bangsa membuat masyarakat mudah terpecah. Makanya perlu peran pemerintah daerah dan pusat untuk menguatkan kembali karakteristik bangsa. Karakter Bangsa, dulu dan kini karakter bangsa Indonesia terbilang kuat sebelum zaman kemerdekaan, tatkala mencapai kemerdekaan, dan saat mempertahankan kemerdekaan. Bayangkan, hanya bermodalkan bambu runcing, penjajah Belanda yang dilengkapi persenjataan canggih persenjataan canggih berhasil diusir anak-anak bangsa ini.

Kini, karakter masyarakat Indonesia tidak sekuat pada masa lalu, sudah sangat rapuh. Daya juang bangsa ini nyaris hilang ditelan berbagai godaan kepentingan sesaat. Masih tingginya praktik korupsi di Indonesia dan bergentayangnya makelar kasus dengan terindikasi adanya jaringan mafia hukum merupakan potret buram sistem penegakan hukum di Indonesia.

Belum terselesainya kasus Bank Century, perlakuan diskriminatif dalam penjara yang kini menjadi buah bibir, dan penculikan bayi yang terbukti melibatkan petugas rumah sakit dan Puskesmas, semakin memperkuat pandangan bahwa karakter bangsa ini dalam kondisi yang amat lembek. Keburukan menjadi sesuatu yang biasa dan nilai-nilai kebaikan telah menjadi barang mewah di negeri ini.

Berbagai dekadensi moral ini muncul terkait dengan semakin lemahnya satu pilar pembangunan manusia seutuhnya. Pendidikan kita semakin tanpa arah, bias. Ironisnya, pemerintah masih saja berkukuh menyelenggarakan ujian nasional yang tak memiliki saham berarti untuk menguatkan karakter bangsa.

Menurut Berkowitz (1998), kebanyakan orang mulai tidak memperhatikan lagi bagaimana pendidikan itu dapat berdampak terhadap perilaku seseorang. Itulah cacat terbesar pendidikan gagal untuk menghadirkan generasi anak-anak bangsa yang berkarakter kuat. Pendidikan seharusnya mampu menghadirkan generasi yang berkarakter kuat, karena manusia sesungguhnya dapat dididik, dan manusia pada dasarnya adalah *animal educandum*, yaitu "*binatang*" yang harus dan dapat dididik.

Itulah makanya filsuf Aristoteles mengingatkan, sebuah masyarakat yang budayanya sudah tidak lagi memperhatikan pentingnya pendidikan atau tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai suatu *good habits*, akan membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk.

Karakter adalah istilah yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti "*menandai*", yaitu menandai

tindakan atau tingkah laku seseorang. Jadi, seseorang disebut berkarakter bila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Karena itu, seseorang perlu mendapatkan pendidikan karakter.

Dengan pendidikan karakter, kata Lickona (1991), budi pekerti dan tingkah laku orang tersebut terbentuk. Hasilnya akan terlihat dalam tindakan nyata. Orang tersebut akan bertingkah laku baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, bekerja keras, dan lain-lain.

Untuk memiliki karakter atau budi pekerti yang baik itu perlu adanya latihan yang serius dan terus-menerus. Meski manusia memiliki karakter bawaan, itu tidak berarti karakter itu tak dapat diubah. Perubahan karakter mengandaikan suatu perjuangan yang berat, suatu latihan yang terus-menerus untuk menghidupi nilai-nilai yang baik.

Kita tentu setuju bahwa membangun sebuah kebiasaan untuk berbuat baik itu tak selalu mudah, meski dorongan untuk berbuat kebaikan memang ada. Tapi, jika dorongan yang tidak baik itu terus dibiarkan hadir, keinginan yang baik dengan mudah didesak mundur. Bila kecenderungan-kecenderungan ke arah yang tidak baik berkembang semauanya, kekacauanlah yang terjadi. Semua agama tentu mengajarkan kebaikan dalam diri seorang anak manusia. Masalahnya, bagaimana manusia itu mengonstruksi diri sendiri, di mana yang baik dikembangkan dan yang jelek dikurangi atau dihilangkan, itulah pekerjaan yang harus dilakukan setiap saat, setiap hari.

Karena itu, dalam banyak hal karakter yang baik lebih patut dipuji dibandingkan bakat yang luar biasa. Bakat adalah anugerah, sedangkan karakter yang baik tidak dianugerahkan. Karakter yang baik lahir dari latihan dan perjuangan yang keras, terus-menerus.

E. KESIMPULAN

Kerusakan moral suatu bangsa dapat terjadi karena sudah berkurangnya kesadaran terhadap rasa nasionalis dari warganegara itu sendiri. Seperti yang sudah di sebutkan di dalam pembahasan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan moral bangsa seperti:

1. Adanya budaya luar yang masuk dalam negara indonesia yang mudah di terima oleh warga negara itu sendiri.
2. Faktor ekonomi.
3. Kurangnya rasa kerukunan dalam diri individu.

Kemerosotan moral bangsa Indonesia dapat dikembalikan dengan mensucikan kembali nilai-nilai Pancasila yang telah ternoda oleh keditakoran era Orde Baru. Akibat dari kegamangan tersebut adalah

menyurutkan makna ideologis Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa, maupun sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan bangsa negara lainnya yang akan berhubungan dengan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

<http://sari.student.fkip.uns.ac.id/2009/01/13/pendidikan-di-era-globalisasi/>

<http://www.ilmupendidikan.net/2009/10/19/kemerosotanberbasis-lokal-berwawasan-global.php>

Karakter Bangsa, Dulu dan Kini Investor Daily, 23 Januari 2010

Binsar A. Hutabarat

Karakter Bangsa, Dulu dan Kini Investor Daily, 23 Januari 2010 Binsar A. Hutabarat.

Kompas, Tgl 6 Mei 2011. Pentingnya Pendidikan Pancasila di Sekolah.

Sumantri, E. 1999. Community Civic Education An Indonesian Case. Bandung: CICED

Sumber: Berita Iptek Topik: Sosiologi, By redaksi Selasa, 19-April-2011, 09:31:3596